



ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Devie Permana, Agung Firman Sampurna

Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia

Email: permanadevie@gmail.com, agung.fs@ui.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Laju Pertumbuhan; Kontribusi; Pendapatan Asli Daerah

ABSTRAK

Sebagai ibukota negara, Jakarta memiliki jumlah penduduk terpadat dan tingkat mobilisasi tinggi penduduknya, sehingga meningkatkan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hal tersebut mendorong Pemerintah Daerah untuk semakin menggali potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan juga untuk mengetahui sebesar apa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta cenderung meningkat setiap tahunnya dan kontribusi pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta cukup berkontribusi, sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dianggap komponen yang signifikan dalam penyumbang pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Keywords: *Vehicle Tax, Growth Rate; Contribution; Local Revenue*

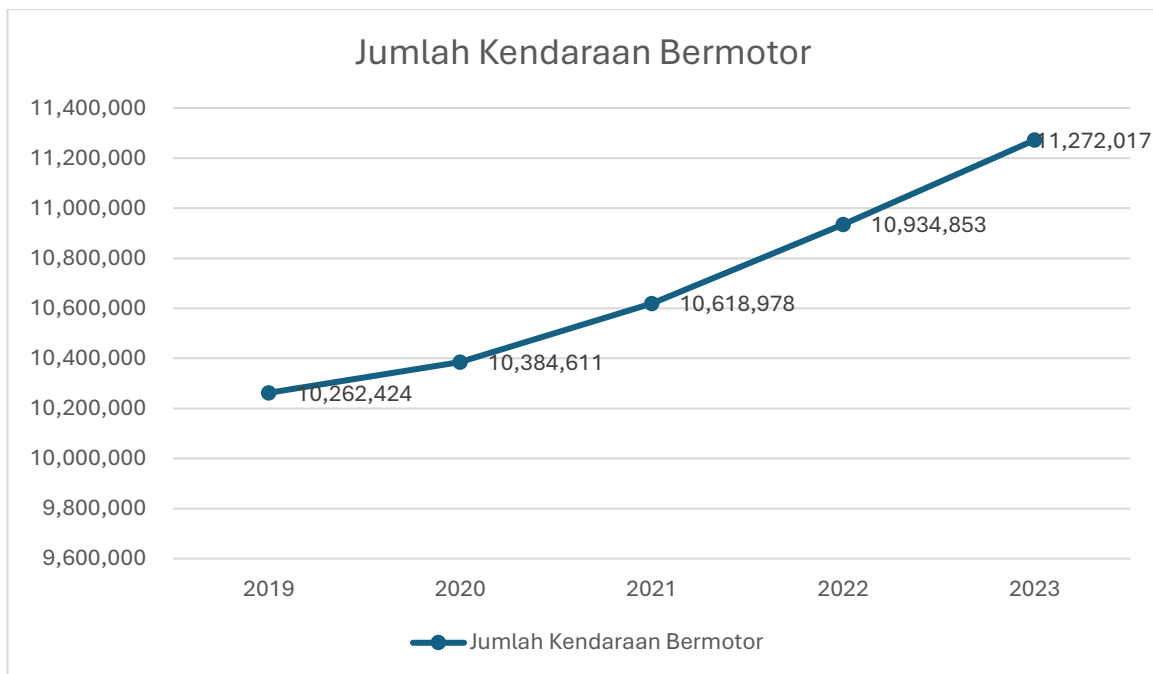
ABSTRACT

As the capital city of the country, Jakarta has the densest population and high level of mobilization of its population, thus increasing the number of vehicle ownership in DKI Jakarta. This encourages the Regional Government to further explore the potential for motor vehicle tax revenue in DKI Jakarta. The realization of vehicle tax revenue in DKI Jakarta in the period 2019 to 2023 tends to increase every year. The purpose of this study is to determine the growth rate of vehicle tax in DKI Jakarta from 2019 to 2023 and to find out how much vehicle tax contributes to local revenue in DKI Jakarta. This research uses a quantitative descriptive research approach. The results of this study show that the growth rate of vehicle tax revenue in DKI Jakarta tends to increase every year and the contribution of vehicle tax in DKI Jakarta is quite contributing, so that vehicle tax

can be considered a significant component in contributing to local revenue in DKI Jakarta Province which is used for the benefit of organizing local government.

PENDAHULUAN

Jakarta sebagai kota megapolitan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pesat, pada 2023 jumlah penduduk Jakarta sebanyak 10.672.100 jiwa (Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2024). Pertumbuhan populasi yang pesat ini berbanding lurus dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi, baik dalam hal pergerakan harian masyarakat maupun kebutuhan akan transportasi. Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, banyak orang yang datang ke Jakarta untuk bekerja, berbisnis, atau mencari pendidikan, sehingga jumlah kendaraan pribadi semakin bertambah. Data menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan akan mobilitas yang fleksibel dan cepat. Pertumbuhan kendaraan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (2024)

Dalam Gambar 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah kepemilikan di DKI Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah memiliki hubungan yang sangat erat (Sudiarto, 2020), karena pendapatan yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor sering kali memainkan peran penting dalam mendanai kegiatan dan layanan pemerintah daerah. Salah satu alasan utama dari hubungan ini adalah bahwa pajak kendaraan bermotor, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, secara langsung berkorelasi dengan jumlah penggunaan jalan oleh individu. (Purnamawati, 2021). Pajak kendaraan bermotor memiliki beberapa hubungan dan relevansi dengan pajak daerah secara umum (Yanti, 2018), hal ini dikarenakan kendaraan bermotor memiliki sifat yang tetap ada di wilayah tertentu dan dikenakan pajak setiap tahunnya, ini memberikan kontribusi pendapatan yang cukup dapat diandalkan untuk pemerintah daerah sebagai implementasi konsep otonomi fiskal, selain itu penerimaan dari pajak kendaraan bermotor juga berfungsi untuk membiayai layanan publik yang terkait dengan transportasi dan infrastruktur jalan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan di beberapa negara. Konsep pajak kendaraan bermotor adalah untuk menghasilkan pendapatan pajak bagi pemerintah dengan membebankan biaya kepada pemilik kendaraan bermotor (V. Simanjuntak, 2018). Terdapat 2 pendekatan dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor, pertama pajak kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan properti kendaraan yang dimiliki dan pembayaran pajak kendaraan bermotor membuat legal secara administrasi bagi kendaraan bermotor dikendarai di jalan raya (Natalia, 2017), kedua pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan emisi kendaraan yang mencemari lingkungan (Lambonan, 2024). Selain fungsinya sebagai pendapatan, pajak kendaraan bermotor berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur jumlah kendaraan di jalan, yang bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Pajak ini membantu memastikan bahwa pemilik kendaraan berkontribusi pada biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan, serta mengurangi dampak lingkungan dari emisi kendaraan (P. G. Simanjuntak & Dompak, 2024).

Besaran pajak kendaraan bermotor didasarkan oleh beberapa faktor seperti jenis kendaraan, ukuran dan kapasitas mesin, dan tingkat emisi yang dihasilkan (Ardiansyah, 2022). Selain itu tarif pajak kendaraan bermotor dapat bervariasi tergantung jenis bahan bakar yang digunakan, dengan pajak yang lebih tinggi dikenakan oleh kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar (diesel) dan bensin (Pasaribu, 2024), yang mencerminkan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kendaraan tersebut. Strategi ini sejalan dengan upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas udara.

Pengenaan pajak pada kendaraan bermotor menurut William J. Schultz dan Harris C. Lowell ditentukan melalui kriteria-kriteria yaitu (Samudra, 2015) :

1. Gross Weight /Net Weight

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditentukan melalui kriteria berat kotor atau berat bersih dari kendaraan bermotor, bahwa berat suatu kendaraan mempengaruhi kerusakan jalan yang ditimbulkan di jalan raya, yang artinya semakin besar berat kendaraan semakin besar pula kerusakan jalan yang ditimbulkan.

2. Horse Power Vehicle

Dasar pengenaan pajak kendaraan ditentukan dari tenaga atau kapasitas silinder (*cylinder capacity/cc*) yang dihasilkan oleh kendaraan, semakin besar kapasitas silinder maka pembakaran bahan bakar akan semakin boros sehingga menyebabkan polusi.

3. Ownership

Besarnya pajak kendaraan bermotor ditentukan dari jenis kepemilikan kendaraan, yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Pengenaan pajak untuk kendaraan umum lebih kecil dibandingkan kendaraan pribadi dan tidak memperhitungkan jumlah kepemilikan kendaraan.

4. Seat Capacity

Besarnya pajak kendaraan bermotor ditentukan dari jumlah daya tampung penumpang kendaraan.

5. Type Vehicle

Besarnya pajak kendaraan bermotor ditentukan dari jenis kendaraan, apakah jenis kendaraan sedan, *jeep*, truk, bus, kendaraan beroda dua, tiga dan seterusnya. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pemerintah memperhitungkan biaya-biaya lain karena akibat yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, seperti *spillover cost* atau biaya-biaya yang disebabkan oleh penambahan dalam jumlah kemacetan di jalan raya, penambahan karena pencemaran udara serta akibat-akibat yang mengurangi keindahan, kebisingan, dan pemandangan yang kotor.

Penerimaan pajak memiliki peran sebagai fungsi penerimaan dan juga sebagai fungsi regulasi (Najicha, 2022). (Reyvani et al., 2024). Sebagai fungsi penerimaan pajak kendaraan bermotor mempunyai fungsi untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik (Yanto,

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta

2018). Selain itu pajak kendaraan bermotor juga mempunyai fungsi regulasi untuk mengatur jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta karena dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor (Hadi, 2020). Di dalam pemanfaatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah terdapat skema *earmarking tax* dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pendapatan pajak tertentu dialokasikan atau diperuntukan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut oleh pemerintah provinsi (Kurniawan, 2022). Untuk melaksanakan kewenangan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat ditabel berikut.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Realisasi
2019	8.844.155.231.721
2020	7.879.175.181.468
2021	8.634.664.519.292
2022	9.404.927.298.262
2023	9.399.790.096.250

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. DKI Jakarta

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tidak serta merta membuat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat. Penelitian Astuti dan Yudea (2016) menekankan pentingnya memantau pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan mengembangkan strategi pengembangan yang efektif. Penelitian mengenai analisis laju pertumbuhan pajak daerah dilakukan oleh yang meneliti mengenai Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. Hasil penelitiannya menyebutkan jika laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat meningkat di Pamekasan setiap tahunnya.

Penelitian sebelumnya terkait kontribusi pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh (Rizal & Hidayah, 2018) dengan penelitian tentang laju pertumbuhan dan kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat besaran laju pertumbuhan PKB dan BBNKB serta kontribusinya terhadap PAD Provinsi Aceh Timur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan PKB dan BBNKB meningkat tiap tahunnya namun kontribusinya terhadap PAD kurang berkontribusi.

Untuk mengukur besaran kontribusi suatu jenis pajak daerah adalah dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada periode yang sama. Semakin tinggi besaran prosentase artinya semakin besar pula kontribusi dan peranan jenis pajak daerah tersebut terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya semakin kecil prosentase artinya kontribusi jenis pajak daerah tersebut terhadap pendapatan asli daerah semakin kecil. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang tinggi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berjalan baik sebagai bentuk dari keberhasilan otonomi daerah (Bahl & Bird, 2018).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan juga untuk mengetahui besaran kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam proses penelitian ini diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian. (Watusseke & Pangemanan, 2016) menyebutkan bahwa data kuantitatif merupakan suatu data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Sedangkan penelitian deskriptif menurut (Sekaran & Shawis, 2009) dilakukan untuk memastikan kemampuan mendeskripsikan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Metode penelitian deskriptif kuantitatif dicirikan oleh desain penelitian yang sangat terstruktur, di mana peneliti bertujuan untuk sepenuhnya objektif dan terlepas dari fenomena yang diamati (Creswell, 2006). Sehingga penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode untuk menganalisis data yang menggunakan angka-angka dalam menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. Dalam penelitian ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif karena peneliti menggunakan data-data yang berhubungan dengan angka-angka.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data atau informasi dari buku atau laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian ini agar didapatkan hasil penelitian akuntabel. Selain itu, juga melakukan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak informan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menyajikan dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dengan menggambarkan secara apa adanya sesuai dengan realita yang ada. Pada penelitian ini langkahnya sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Menghitung laju pertumbuhan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber : Abdul Halim dalam Astuti dan Widea (2016)

Keterangan :

GX : Laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor

X_t : Tahun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor

X(t-1) : Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun sebelumnya

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menghitung kontribusi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Abdul Halim dalam Astuti dan Widea (2016)

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta

Halim dalam (Fajar, 2017) mengklasifikasikan kriteria kontribusi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Prosentase %	Kriteria
≥ 50	Sangat baik
40 – 50	Baik
30 – 40	Sedang
20 – 30	Cukup
10 – 20	Kurang
≤ 10	Sangat kurang

Sumber : Halim dalam Fajar (2017)

Permasalahan pada penelitian ini hanya akan difokuskan pada analisis laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta

Sebagai fungsinya dalam menopang penerimaan dalam APBD, pertumbuhan pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya. Selain untuk membiayai program-program pemerintah daerah berupa penyediaan barang dan jasa publik, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor digunakan juga untuk membiayai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, peningkatan moda sarana transportasi umum, dan membiayai eksternalitas yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan konsep *earmarking tax*. Laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, jika laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor tidak meningkat atau mengalami penurunan tiap tahunnya maka kinerja pemerintah daerah dalam memingkatkan *tax ratio* dari pajak kendaraan bermotor dianggap kurang baik, namun hal tersebut kadang terjadi dikarenakan adanya faktor eksternal seperti pandemi Covid 19 yang terjadi di tahun 2020 dan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan listrik.

Laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel 3, dengan menggunakan data target penerimaan dan realisasi pajak kendaraan bermotor yang didapat peneliti (sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta) dan rumus Halim dalam (Astuti & Yudea, 2016), maka laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	Xt - X (t-1) (%)	GX (%)
2019	8.800.000.000.000	8.844.155.231.721	290.523.027.078	3,4%
2020	8.000.000.000.000	7.879.175.181.468	(964.980.050253)	-10,9%
2021	8.800.000.000.000	8.634.664.519.292	755.489.337.824	9,6%
2022	9.000.000.000.000	9.404.927.298.262	770.262.778.970	8,9%
2023	9.100.000.000.000	9.399.790.096.250	-5.137.202.012	-0,1%

Sumber : Diolah Peneliti

Dari tabel 3 tersebut dapat dilihat jika laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 penerimaan

pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 3,4% dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 terjadi defisit pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar -10,9% dari tahun 2019, namun untuk tahun 2021 dan 2022 kenaikan laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor naik signifikan untuk mengejar defisit pertumbuhan di tahun 2019 yaitu sebesar 9.6% di tahun 2021 dan sebesar 8.9% di tahun 2022. Untuk tahun 2023 dapat dilihat bahwa terjadi sedikit penurunan laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor menjadi defisit 0.1%. Menurut hasil wawancara dengan Deniel Al Mansyuri selaku Kepala Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Bidang Pendapatan Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan alasan mengapa laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta menurun pada tahun 2020 dan 2023, yaitu:

“Terhadap penurunan laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2020 terjadi karena adanya dampak dari Covid 19 dimana adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan faktor pegawai Badan Pendapatan Daerah yang menerapkan kebijakan Work Form Home yang membuat kegiatan intensifikasi pemungutan menjadi tidak efektif. Kemudian pelonjakan kenaikan laju pertumbuhan penerimaan di tahun 2021 dan 2022 dikarenakan adanya kebijakan pemulihan ekonomi pasca Covid 19 berupa insentif pajak berupa pengurangan pokok pajak dengan kriteria tertentu dan penghapusan sanksi bunga keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya terjadi penurunan laju pertumbuhan penerimaan di tahun 2023 akibat adanya kebijakan insentif pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di DKI Jakarta serta adanya instruksi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan tidak adanya tindakan penilangan terhadap kendaraan bermotor di jalan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor.”

Menurut Deniel Al Mansyuri selaku narasumber menjelaskan bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta Tahun 2020 dikarenakan adanya dampak penurunan ekonomi akibat Covid 19 pembatasan kegiatan masyarakat diluar ruangan. Untuk tahun 2023 penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dikarenakan adanya kebijakan insentif pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan listrik berbasis baterai (EV) disaat pertumbuhan kendaraan listrik yang semakin masif dan sudah tidak adanya penindakan hukum terhadap kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta

Mengukur atau menghitung sumbangsih atau kontribusi pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta dapat dilakukan dengan melakukan analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan melakukan perbandingan hasil analisis kontribusi tersebut dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dimana dari hasil analisis tersebut akan terlihat kontribusi pajak kendaraan bermotor dari yang terbesar sampai yang terkecil dari tahun ke tahun dalam jangka waktu 2019 sampai dengan 2023. Sehingga seberapa besar peran pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta dapat diketahui dengan menggunakan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Pada tabel 4 terlihat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta (sumber: Badan Pendapatan Daerah), yang kemudian diolah untuk mendapatkan hasil analisis kontribusinya.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi	Kriteria
2019	8.844.155.231.721	45.707.400.003.802	19,35%	Kurang

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta

2020	7.879.175.181.468	37.414.754.711.193	21,06%	Cukup
2021	8.634.664.519.292	41.606.307.405.630	20,75%	Cukup
2022	9.404.927.298.262	45.608.404.729.501	20,62%	Cukup
2023	9.399.790.096.250	49.139.745.715.234	19,13%	Kurang
Rata - Rata			20,18%	Cukup

Sumber : Diolah Peneliti

Menurut hasil wawancara dengan Deniel Al Mansyuri selaku Kepala Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Bidang Pendapatan Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan alasan mengapa penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yaitu:

“Jika dilihat dari 14 jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2 jenis pajak yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan P2. Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor memang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah seiring meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta ditambah dengan tarif progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya, namun seiring waktu kontribusi dari pajak kendaraan bermotor semakin menurun dari tahun ke tahun bersaing jika dibandingkan dengan penerimaan dari PBB P2 yang sekarang menjadi puncak kontribusi penerimaan dalam PAD, dapat dilihat dari retribusi target penerimaan dimana saat ini target penerimaan PBB P2 diatas PKB. Selain itu adanya kebijakan insentif penghapusan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan listrik dan NJKB kendaraan yang selalu menyusut tiap tahunnya yang membuat penerimaan PKB akan semakin menurun kedepannya.”

Menurut Deniel Al Mansyuri selaku narasumber menjelaskan kenapa penerimaan pajak kendaraan bermotor cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah diantaranya kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor dan adanya kebijakan tarif progresif untuk kendaraan bermotor kepemilikan kedua dan seterusnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : *pertama*, laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, walaupun ditahun 2020 terjadi penurunan dikarenakan adanya bencana Covid 19, namun setelahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor terus meningkat, walaupun terjadi stagnansi penerimaan di tahun 2023. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta cenderung meningkat setiap tahunnya.

Kedua, kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah cukup signifikan, dimana rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 20.18%. Selain itu kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya terus turun, hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor akan terus menurun, sebagai jenis pajak yang menyumbang kontribusi penerimaan cukup signifikan maka penggalan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor harus terus ditingkatkan untuk pembiayaan kegiatan dan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta kedepannya.

BIBLIOGRAFI

- Ardiansyah, A. N. U. R. (2022). Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 141/Pmk. 010/2021 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Politeknik Keuangan Negara Stan.
- Hadi, B. B. (2020). Analisis Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Dki Jakarta Tahun Pajak 2018.
- Kurniawan, A. (2022). Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi. *Dinamika Hukum*, 13(3).
- Lambonan, J. M. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Yang Mencemari Lingkungan Dan Mengakibatkan Polusi Udara Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 12(5).
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169–181.
- Natalia, R. (2017). Pengaruh Jumlah Dan Jenis Kendaraan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah (Jeda)*, 5(4).
- Pasaribu, D. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Niaga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Dengan Menggunakan Pembayaran Cek Mundur. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Purnamawati, E. (2021). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1).
- Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2024). Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), 961–966.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Di Samsat Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 84–91.
- Simanjuntak, P. G., & Dompok, T. (2024). Perbandingan Administrasi Persyaratan Kepemilikan Kendaraan Di Indonesia Dan Singapura. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (Snistek)*, 6, 468–474.
- Simanjuntak, V. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di 6 Kota Di Sumatera Utara Periode Tahun 2005-2016.
- Sudiarto, E. (2020). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2).
- Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 6(2).
- Yanto, A. (2018). Pengaruh Pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Mengenai Sanksi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Timur. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (SteI) Jakarta*.